

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH
DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT**

Resty Dwi Anjani

NPP. 30.0579

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: rdanjani29@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : This research began with the waste problem in Bekasi City which has been around for years and has not yet been resolved. Established cross-sectoral involvement in waste management is highly expected in resolving this problem. **Purpose:** The research aims to find out and describe the process of collaborative governance in waste management through the waste bank program in Bekasi City, West Java Province and to find out the supporting and inhibiting factors in this collaborative action. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The informant selection technique uses a purposive sampling technique and uses data analysis methods used, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Researchers use the Collaborative Governance theory proposed by Ansell and Gash. **Result:** The results of this research show that waste management through the waste bank program in Bekasi City has not gone well because strong sectoral relationships have not been established between the community, government and private sector. The exclusivity of each sector and different resource conditions are the main factors in supporting collaborative action between stakeholders. Then on the other hand, there are also inhibiting factors such as a lack of awareness among the public to start managing their own waste. **Conclusion:** In conclusion, collaborative governance in waste management through the waste bank program in Bekasi City can be implemented, but the stakeholders involved still need to pay attention to comprehensive steps in dealing with the inhibiting factors that researchers have described in this research.

Keywords: *collaborative, waste management, waste bank*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penelitian ini berangkat dari permasalahan sampah di Kota Bekasi yang sudah menahun dan belum berhasil terbenahi. Terjalannya keterlibatan dari lintas sektoral dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan ini. **Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat pada tindak kolaboratif tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta

dokumentasi. Teknik pemilihan informannya menggunakan teknik purposive sampling serta menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. **Hasil/Temuan:** hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi belum berjalan baik karena belum terjalinnya hubungan sektoral yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan swasta. Eksklusivitas masing-masing sektor dan kondisi sumber daya yang berbeda menjadi faktor utama dalam mendukung adanya tindak kolaboratif antar stakeholders. Kemudian di lain sisi terdapat juga faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mulai mengelola sampahnya sendiri. **Kesimpulan:** Kesimpulannya, collaborative governance dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi sudah dapat dilaksanakan, namun stakeholders yang terlibat masih perlu memperhatikan langkah komprehensif dalam menangani faktor penghambat yang telah peneliti uraikan pada penelitian ini.

Kata Kunci: kolaboratif, pengelolaan sampah, bank sampah

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Meningkatnya timbulan sampah di Kota Bekasi membuat persoalan sampah menjadi tidak kunjung usai dan kemudian dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran apabila tidak adanya pengelolaan sampah yang baik. Kemudian Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengemukakan bahwa Kota Bekasi setiap harinya bisa menghasilkan 1.890 ton yang terdiri dari 700 ton lebih sampah plastik (non-organik) dan sisanya adalah sampah organik, sayangnya Kota Bekasi hanya memiliki satu TPA yaitu TPA Sumur Batu yang hanya berkapasitas 1000 ton perharinya. Pada pengelolaan sampah yang terlaksana di Kota Bekasi tentu saja kondisi saat ini masih sangat jauh dari target yang diharapkan.

Kenaikan pada jumlah sampah di Kota Bekasi ini sejalan dengan jumlah penduduk di Kota Bekasi yang semakin banyak dan juga didukung dengan kurangnya kesadaran dan keikutsertaan masyarakatnya dalam mengelola sampah dengan benar dan agar tidak memperburuk kondisi lingkungan dengan sekadar membuang sampah tepat di tempatnya, memilah dan memisahkan sampah sesuai jenisnya, serta tidak diimbangi dengan tempat pembuangan sampah yang memadai, dalam hal ini TPA Sumur Batu, TPA satu-satunya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi yang kapasitasnya *overload* sehingga sampah yang diproduksi warga Kota Bekasi tidak bisa sepenuhnya diangkut ke TPA tersebut dan menimbulkan banyaknya TPS liar yang bermunculan.

Pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi dari tahun 2020-2022 yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang berjumlah 2,543,676 jiwa kemudian pada tahun 2021 sebanyak 2,543,676 jiwa dan pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapai 2,590,257 jiwa (5% jumlah total penduduk Provinsi Jawa Barat). Sebagai kota yang menjadi penyangga ibukota Jakarta, sayang sekali bahwa kenyataannya Kota Bekasi memiliki jumlah penduduk yang padat namun tidak diiringi dengan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, satu-satunya TPA yang dimiliki yaitu TPA Sumur Batu yang saat ini kondisinya telah *overload* karena hanya menggunakan metode *open dumping* yang mana pengelolaan sampahnya masih berupa sistem kumpul-angkut-buang. (Sholihah, 2020)

Kemudian untuk menjalani amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwasannya Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik serta berwawasan lingkungan, maka Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik kerja sama antar daerah, memiliki kerja sama dengan swasta yang berkecimpung di bagian pengelolaan sampah dan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Konsep pengelolaan sampah yang berbasis kolaborasi didukung oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang membuka kesempatan seluas-luasnya berbagai pihak untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Kebiasaan konvensional yang masih menggunakan cara timbun, angkut, dan buang akan segera ditinggalkan dan diganti dengan pengelolaan sampah lainnya dilakukan dengan pembentukan bank sampah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021). Pendirian bank sampah merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar turut serta dan peduli terhadap lingkungan yang ditempatinya dalam rangka pengelolaan sampah, dan apabila dilihat dari sisi ekonomi, program bank sampah ini juga mengelola tabungan sampah serta kegiatan pendauran ulang sampah dengan mengkreasikan kerajinan dari sampah yang menghasilkan barang yang bernilai ekonomis (Sakir & Setianingrum, 2021).

I.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Jumlah sampah di Kota Bekasi yang setiap tahunnya meningkat seiring dan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di kota tersebut yang padat dan didukung oleh berkembangnya IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kemudian menimbulkan kecenderungan kebiasaan masyarakat menjadi lebih boros. Timbulan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya yang membuat hal tersebut menjadi persoalan utama yang sulit untuk dipecahkan sampai dengan sekarang. Kota Bekasi sendiri dikatakan sebagai kota metropolitan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat namun berdampingan langsung dengan Ibukota Jakarta. Kota Bekasi memiliki luas wilayah keseluruhan 21.049.000 km persegi, memiliki 12 Kecamatan serta 56 Kelurahan. Kondisi Kota Bekasi saat ini seperti yang dikatakan oleh Harahap (2013) bahwa peningkatan jumlah sampah disebabkan oleh membengkaknya jumlah penduduk serta konsumsi masyarakat yang ada di perkotaan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi bersama lembaga non-pemerintah dalam hal ini masyarakat dan swasta ataupun kemudian menjalankan program bank sampah tersebut sebagai upaya menekan jumlah timbulan sampah yang dikumpulkan ke TPA dan program tersebut berbasis komunitas agar bisa meningkatkan kesadaran serta mengubah perilaku masyarakat. Tujuan dari program bank sampah yang dijalankan di Kota Bekasi adalah agar terciptanya kondisi ideal sebagaimana lingkungan serta hunian yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bekasi dan dengan cara ini diharapkan warganya dapat menjadi disiplin dan bisa menambah pemasukan dari sampah-sampah tersebut.

I.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan objek penelitian, terdapat 5 (lima) penelitian yang sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu pengelolaan sampah (Apriliani & Maesaroh, 2021; Eprianti et al., 2021; Riyadi et al., 2022; Herdiana et al., 2022; serta Dalinda et al., 2022). penelitian oleh Dian Apriliani & Maesaroh pada tahun 2021, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program SILAMPAH (Sistem Lapor Sampah)”, penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah sehingga masyarakat di Kota Semarang belum siap dengan

keberadaan aplikasi SILAMPAH yang dapat disimpulkan bahwa aplikasi tersebut dapat dikatakan belum berjalan secara optimal untuk menjadi inovasi dalam penanganan sampah di Kota Semarang. Kemudian, penelitian oleh Idris, Dian Herdiana, dan Iqbal Miftakhul Mujtahid yang berjudul “*Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna” menghasilkan proses *collaborative governance* dalam mengentaskan permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna sudah cukup baik dan faktor penghambat pada proses kolaboratif ini masih terjadi pada kurangnya pengalokasian anggaran. Yang ketiga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Barry Dalinda, Marlien Lopian, dan Ismail Sumampow pada tahun 2022 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado” yang menghasilkan bahwa aspek komunikasi antara stakeholder yang memiliki kaitan atau berhubungan dengan program serta kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Wanea telah berlangsung baik namun sumber dayanya belum sepenuhnya memadai. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Nanik Eprianti, Neng Himayasari, Ilham Mujahid, dan Popon S pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Program 3R di Desa Jatihandap, Kelurahan Jatihandap, Kota Bandung)”, penelitian ini menghasilkan pembuktian bahwa ilmu pengetahuan serta wawasan masyarakat yang meningkat tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang baik. Yang terakhir, terdapat penelitian oleh Agus Riyadi, d.k.k. pada tahun 2022 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi di Kelurahan Mijen Kota Semarang” yang kemudian menunjukkan hasil penelitian bahwa terjadinya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi di setiap tahapan, mulai dari tahapan untuk mengambil keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan barang yang ekonomis. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi serta adanya perubahan perilaku masyarakat di Kelurahan Mijen.

I.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh penelitian yang terdahulu dengan konteks penelitian yang dilakukan adalah mengamati bagaimana proses *collaborative governance* yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang penelitiannya berfokus di Kota Bekasi.

I.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana proses serta faktor-faktor yang memengaruhi pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi agar dapat mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Bekasi.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam melakukan penelitian terkait pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi. Metode ini digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi, gambaran, atau tulisan secara sistematis sesuai dengan fakta di lapangan terkait objek atau peristiwa yang diteliti.

Penelitian memiliki tujuan dalam mendapatkan data yang tervalidasi dan objektif bagi hal yang akan diteliti di lapangan, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat. Dalam proses mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan fokus penelitian, penulis

harus menggunakan teknik yang tepat dalam proses pengumpulan data. Adapun analisisnya menggunakan teori *collaborative governance* yang dicanangkan oleh Ansell dan Gash (2007) untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses dan faktor-faktor yang memengaruhi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisa bagaimana proses dan faktor yang memengaruhi *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi berdasarkan pendapat dari Ansell dan Gash (2007). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

III.1 Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kota Bekasi

III.1.1 Dialog Tatap Muka

Pada indikator ini peneliti mendefinisikan suatu tahapan awal dalam tindak kolaboratif yang mana masing-masing *stakeholders* melaksanakan dialog tatap muka dalam suatu forum. Tahapan ini penting karena di mana masing-masing *stakeholders* yang terlibat dapat mengidentifikasi tujuan dalam kesatuan tindakan yang akan dilakukan dalam tindak kolaboratif yang akan dijalani.

Melalui hasil wawancara di atas dapat diketahui hubungan komunikasi yang terjalin antara *stakeholders* yang terlibat pada tindak kolaboratif dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi. Terjalannya dialog antar *stakeholders* sudah berjalan dengan baik, baik komunikasi formal maupun nonformal. Namun sepertinya keterlibatan serta keaktifan masyarakat perlu untuk diperhatikan lagi, dalam proses dialog yang dilakukan dalam penanganan ini. Pemerintah sementara waktu dapat melakukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan pihak swasta dengan cara melaksanakan berbagai program sosialisasi pentingnya mengelola sampah untuk kehidupan yang lebih baik.

III.1.2 Pembangunan Kepercayaan

Terbangunnya kepercayaan merupakan kunci dalam melakukan tindakan kolaboratif walau juga umum ditemukan keadaan di mana tingkat kepercayaan antar masing-masing *stakeholders* masih rendah dalam melaksanakan tindak kolaborasi. Tindak kolaboratif merupakan sebuah bentuk komitmen jangka panjang yang mana dalam pelaksanaannya, penting untuk membangun kepercayaan lintas sektor agar dapat mencapai hasil dan tujuan yang telah disepakati.

Dari hasil wawancara bersama beberapa informan terkait indikator pembangunan kepercayaan dari masing-masing *stakeholders* dari tindak kolaboratif yang telah dilaksanakan adalah bahwasanya dari sektor pemerintah mengajari untuk berprinsip memiliki citra dan kompetensi dan menunjukkan kapasitas serta kemampuan yang dapat meningkatkan kepercayaan, baik dari pimpinan maupun dari siapa pun yang diajak bekerja sama atau berkolaborasi, kemudian dari sektor masyarakat dapat diketahui terdapat dua tipe masyarakat, yakni masyarakat yang belum mengetahui terkait bagaimana cara mengelola sampah yang efektif dan efisien untuk mengurangi timbunan sampah yang terangkut ke TPA, kemudian terdapat masyarakat yang memang sudah bersedia untuk membantu menyukseskan program bank sampah dengan memilah dan mengubah pandangan negatif tentang sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kemudian bagi pihak swasta, pembangunan kepercayaan didasari oleh komitmen untuk selalu memberikan edukasi serta sosialisasi terkait pengelolaan

sampah agar seluruhnya dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta terbebas dari sampah.

III.1.3 Komitmen Berkolaborasi

Terjalannya tindak kolaborasi menimbulkan rasa ketergantungan atau kebutuhan antar *stakeholders* yang merupakan fondasi yang membentuk komitmen dalam tindak kolaboratif. Ansell dan Gash (2007) menekankan mengenai perlunya memiliki rasa tanggung jawab dalam tindak kolaborasi oleh masing-masing *stakeholders* guna menunjukkan bentuk komitmen terhadap tujuan yang telah disepakati.

Dari hasil wawancara bersama beberapa informan terkait komitmen kolaborasi dari masing-masing *stakeholders* dari tindak kolaboratif yang telah dilaksanakan adalah dengan meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan bagi masyarakat yang belum tergerak untuk berpartisipasi aktif. Peneliti juga menyadari tentu saja dalam setiap suatu proses kolaborasi pasti ada *trial* dan *error*-nya, karena itu diperlukan komitmen dalam berkolaborasi agar tetap bisa mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Masing-masing *stakeholders* juga telah menunjukkan upaya dan usahanya dalam berkomitmen pada tindak kolaboratif ini, hanya perlu peningkatan di lini masyarakat mengenai kesadaran masing-masing individu untuk lebih memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab atas lingkungan tempat tinggalnya.

III.1.4 Pemahaman Bersama

Tahapan ini merupakan indikator dalam proses kolaboratif guna mengukur pemahaman bersama terkait tujuan dan inti dari kolaborasi yang dilakukan. Kesepakatan tujuan yang telah diputuskan perlulah adanya tindak lanjut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para *stakeholders* yang berperan dalam proses kolaborasi tersebut memahami substansi dari kesepakatan dalam tindakan kolaborasi yang akan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti bersama beberapa informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya tindak kolaboratif dalam pengelolaan sampah ini sendiri dinilai penting karena sama-sama memiliki kekhawatiran yang sama atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah yang telah tertimbun secara berlebihan apalagi hanya dibiarkan begitu saja (*open dumping*) di TPA tanpa dilakukan penanganan untuk mengurangi timbunan tersebut. Seluruh *stakeholders* juga berharap masalah ini segera dapat dituntaskan, memang dibutuhkan kesadaran yang lebih dari masyarakat serta ketegasan hukum yang diberlakukan mengenai pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

III.1.5 Dampak Sementara

Indikator dampak sementara ini merupakan gambaran bagaimana capaian minimal dari tindak kolaborasi yang dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholders* agar dapat menjadi modal atau acuan untuk memperbaiki proses tindak kolaboratif yang dilaksanakan ke depannya.

Dari hasil wawancara bersama beberapa informan di atas terkait bagaimana hasil sementara dari tindak kolaboratif yang telah terjalin antar *stakeholders*, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya setiap sektor tentu telah merasakan bagaimana hasil sementara yang telah dilaksanakan sebelum penelitian ini berlangsung. Hasil kajian mengenai indikator ini sudah cukup baik, namun yang menjadi sandungan hanya soal kurangnya kesadaran masyarakat yang memang perlu ditingkatkan agar tindak kolaboratif ini dapat mencapai tujuan yang semestinya.

III.2 Faktor yang memengaruhi Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah

III.2.1 Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan sebuah faktor penentuan bagi terjalannya tindak kolaborasi karena berangkat dari kondisi awal inilah kita dapat menilai apakah kondisi awal inilah yang justru menjadi faktor penghambat atau pendorong tindak kolaboratif tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan teknik wawancara dan berkaitan dengan bagaimana kondisi awal tindak kolaboratif dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi bahwa faktor pendorong terjalannya tindak kolaboratif ini adalah keterbukaannya Pemerintah Kota Bekasi dalam menindaklanjuti permasalahan sampah yang sudah menahun dengan inovasi program yang dicanangkan untuk pengelolaan sampah agar dapat mengurangi volume sampah. Tindak kolaborasi ini akan berjalan baik dengan adanya kesamaan visi, misi, dan tujuan antar Pemerintah Kota Bekasi, dan pihak swasta yang dalam hal ini adalah Waste4Change dan juga masyarakat. Selanjutnya, timbul rasa saling membutuhkan terkait sumber daya, dapat diartikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi membutuhkan keterlibatan Waste4Change sebagai fasilitator dalam mengedukasi masyarakat melalui berbagai sosialisasi dan pelatihan.

III.2.2 Desain Kelembagaan

Pada desain kelembagaan atau desain institusional ini merujuk pada aturan dasar yang telah disepakati bersama yang kemudian dijalankan dan dipatuhi serta bersifat transparan dan konsisten yang berdasarkan keterlibatan dalam tindak kolaborasi yang telah dibangun atas dasar kesepahaman peran antar masing-masing *stakeholders* dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengumpulan data-data yang berupa dokumen, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada desain kelembagaan dalam terjalannya tindak kolaboratif dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah ini dapat ditarik kesimpulannya yaitu telah dijelaskannya aturan dasar dan juga adanya transparansi dalam tindak kolaboratif ini. Diketahui bahwa yang menjadi aturan dasar dalam tindak kolaboratif ini adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah serta diterbitkannya peraturan yang menjelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Kota Bekasi pada Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2017. Pada tindak kolaboratif yang terjalin antara masing-masing *stakeholders* telah terjadinya proses transparansi dengan adanya pertemuan (dialog tatap muka) dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang bertindak sebagai *leading sector* pada tindak kolaboratif tersebut. Kemudian, pihak Pengelola Waste4Change menunjukkan adanya keterbukaan informasi pada proses kolaboratif yang berlangsung dengan adanya sosialisasi dan juga pelatihan yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial bagi masyarakat Kota Bekasi.

III.2.3 Kepemimpinan yang Fasilitatif

Terdapat faktor penting yang memengaruhi kolaborasi yaitu kepemimpinan yang fasilitatif yang dalam artiannya adalah bagaimana seorang pemimpin dituntut untuk mampu atau memadai dalam mewedahi para anggotanya untuk dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan forum tindak kolaboratif agar tujuan suatu konsensus dapat tercapai. Indikator ini menggambarkan bagaimana kompetensi dan peran seorang pemimpin dalam menyatukan

stakeholders terkait agar dapat berdaya dan berpartisipasi dalam tindakan kolaboratif yang dilaksanakan.

Pada dimensi kepemimpinan yang fasilitatif ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pimpinan dari masing-masing *stakeholders* dapat memengaruhi anggotanya untuk lebih meningkatkan motivasi serta dapat berperan aktif dalam melaksanakan tindak kolaboratif dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah ini. Kemudian, tindakan kolaboratif ini ditujukan agar masing-masing *stakeholders* dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sama terhadap suatu permasalahan yang ditangani dengan efektif serta efisien.

Dari hasil wawancara bersama beberapa informan yang peneliti pilih, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setiap sektor memiliki peluang untuk bekerja sama dengan baik, yang mana masing-masing sektor dinilai sudah memiliki pimpinan yang memiliki karakter yang dibutuhkan dalam proses kolaboratif ini yang mengartikan bahwa pada indikator ini bersifat mendorong terjalannya kegiatan yang bersifat membangun dalam rangka mewujudkan tujuan awal yang sudah ditetapkan dari dibentuknya program bank sampah.

III.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis pada penelitian ini berfokus pada bagaimana proses dan faktor yang memengaruhi *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah yang terdapat di Kota Bekasi, yang mana *output* dari program bank sampah tersebut adalah untuk menangani jumlah sampah rumah tangga yang diproduksi agar dapat terkelola dengan baik dan mengurangi jumlah timbulan sampah yang disalurkan ke TPA.

Adapun program bank sampah yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bekasi ini yaitu Bank Sampah Induk Patriot yang kemudian berfungsi untuk memayungi bank sampah unit yang tersebar di seluruh penjuru kelurahan serta kecamatan yang ada di Kota Bekasi serta didirikan atas dasar kesadaran dari masyarakat dan pegiat lingkungan tentang pentingnya lingkungan yang asri, nyaman dan sehat, program ini juga dibantu sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mana setiap UPTD di Kota Bekasi sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing di setiap wilayahnya.

Program ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sampah yang tiada henti dan masih memupuk banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Diketahui oleh penulis yang bersumber dari internet pada situs kabar dan laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) saat penyusunan latar belakang penelitian ini. Urgensi permasalahan tersebut diperkuat seiring ditemukannya data yang mengilhami adanya pelonjakan pertumbuhan serta kepadatan penduduk yang ada di Kota Bekasi yang menyebabkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan tiap tahunnya.

III.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa faktor yang memengaruhi bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi ini adalah tentang tingkat kesadaran dari masyarakat agar mau bergerak dalam mengelola sampahnya sendiri untuk berkolaborasi bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian yang penulis lakukan mengenai pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kota Bekasi, berpotensi dapat dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi antara tiga sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang mana hal tersebut dapat terlihat melalui hasil pengkajian dari konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) dan kemudian dapat peneliti simpulkan bahwa telah terjalinnya proses dari tindak kolaboratif antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, walaupun belum terjalin secara sempurna yang dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah, karena memang masih terdapat hambatan dalam tindak kolaboratifnya seperti kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, upaya dari terjalinnya tindak kolaboratif ini telah memberikan dampak positif dalam mengatasi permasalahan di Kota Bekasi, hanya diperlukan kesadaran menyeluruh dari masyarakat, dukungan pemerintah, serta keterlibatan aktif dari seluruh stakeholders untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah ini. Kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat dalam tindak kolaboratif ini adalah mengenai kesadaran, pada faktor pendukung, sudah terbentuk kesadaran yang berdasarkan dengan bersukarela dan komitmen solidaritas antar warga yang membuat adanya perubahan pada kultur sosial mengenai kebersihan lingkungan semakin jelas. Kemudian faktor penghambatnya yaitu karena permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bekasi bukanlah permasalahan baru tetapi merupakan permasalahan yang menahun yang tentu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, diperlukan kesadaran dari masing-masing diri warga Kota Bekasi untuk mengentaskan permasalahan ini agar kita dapat mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang bersih dan nyaman.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliani, D., & Maesaroh. (2021). Efektivitas Pengelolaan Sampah Kota Semarang Melalui Program Silampah (Sistem Lapor Sampah). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/29869>
- BPS Kota Bekasi. (2023). Kota Bekasi Dalam Angka 2023. *BPS Kota Bekasi*, 346.
- Dalinda, B., Lopian, M., & Sumampow, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado*.
- Eprianti, N., Himayasari, N. D., Mujahid, I., & Srisusilawati, P. (2021). Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ecoment Global*, 6(2), 179–184. <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.1437>
- Herdiana, I., Muhtahid, D., & Miftakhul, I. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9810–9819. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3269>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10.A Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Bank Sampah Induk Patriot Kota Bekasi

- Riyadi, A., Rahmasari, A., & Sugiarto, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program Bank Sampah Gomi Di Kelurahan Mijen, Kota Semarang. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 193–218. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i1.5873>
- Sakir, & Setianingrum, R. B. (2021). Pendirian Bank Sampah Sebagai Wujud Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa Singoyudan, Mirit, Kebumen. *Surya Abdimas*, 5(4), 434–442. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i4.1355>
- Sholihah, K. K. A. (2020). Kajian Tentang Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Swara Bhumi*, 03(03), 1–9.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>
- Waruwu, H. (2007). Pengelolaan Sampah. In *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, vol. 1, no. 2, 2007, pp. 159-167.

